

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menelusuri literatur yang relevan dengan topik pengembangan ekonomi lokal yang ada di Desa Pandanrejo. Tinjauan ini akan mengkaji berbagai sumber, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian dan untuk mengidentifikasi celah pengetahuan yang dapat diatasi oleh penelitian ini.

Jurnal oleh Sinollah, Muhammad Khilmi menganalisis pengaruh kualitas produk, harga, dan strategi pemasaran terhadap kepuasan pelanggan dalam berbagai konteks, dengan fokus khusus pada Strawberry Barn di Kota Batu, Indonesia, dan industri sepatu. Kedua studi tersebut menggunakan metode kuantitatif untuk menilai bagaimana faktor-faktor ini berkontribusi terhadap loyalitas dan retensi pelanggan, mengungkapkan bahwa perbaikan dalam kualitas produk, harga yang kompetitif, dan pemasaran yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Temuan ini menekankan pentingnya elemen-elemen ini dalam pasar yang kompetitif dan menyarankan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi variabel tambahan yang mempengaruhi persepsi pelanggan. Strategi pemasaran yang efektif mencakup pemahaman terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan. Secara khusus, studi tersebut menekankan bahwa strategi pemasaran yang terstruktur dengan baik memainkan peran penting dalam memenuhi harapan pelanggan, sehingga mendorong loyalitas dan pembelian ulang. Ini sejalan dengan temuan bahwa kualitas produk, harga, dan strategi pemasaran secara kolektif memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Sinollah & Muhammad Khilmi, 2022).

Jurnal oleh Deti Rahmawati, Soedarso, Tony Hanoraga, Yuni Setyaningsih, Khairun Nisa membahas proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan proses komunikasi pemasaran produk stroberi di Kelompok Petani Perempuan Tani di Desa Pandanrejo, Kota Batu, Malang, Indonesia. Dengan memanfaatkan metode Peningkatan Proses Berbasis

Model dan Terintegrasi (MIPI), inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan petani wanita lokal dengan meningkatkan strategi pemasaran, inovasi produk, dan manajemen bisnis secara keseluruhan untuk menciptakan desa wisata yang berkelanjutan. Kegiatan utama meliputi pelatihan komunikasi pemasaran, demonstrasi produk, dan pendidikan manajemen, dengan fokus pada komunikasi terintegrasi untuk meningkatkan ekonomi lokal dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Metode MIPI (Peningkatan Proses Berbasis Model dan Terintegrasi) berkontribusi pada efisiensi proses bisnis di industri pariwisata stroberi lokal dengan memberikan pendekatan terstruktur untuk meningkatkan komunikasi pemasaran dan keseluruhan operasi bisnis (Rahmawati, Soedarso, Hanoraga, Setyaningsih, & Nisa, 2023).

Jurnal oleh Tasya Galuh Maharani, Drs. Sulismadi, M.Si mengkaji strategi manajemen inisiatif agro-wisata Lumbung Stroberi di Desa Pandanrejo, Kota Batu, Indonesia, yang didirikan pada tahun 2018 dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Raharjo. Dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif, termasuk observasi dan wawancara, studi ini menganalisis kerangka manajemen melalui teori AGIL Talcott Parsons, mengungkapkan sebuah tim yang terdiri dari 13 anggota yang memfasilitasi berbagai kegiatan seperti memetik stroberi dan program pendidikan. Inisiatif ini tidak hanya memanfaatkan tanah subur dan iklim yang menguntungkan di desa untuk meningkatkan manfaat ekonomi lokal, tetapi juga menekankan partisipasi masyarakat dan pentingnya agro-wisata dalam meningkatkan nilai pertanian dan kesejahteraan. Proyek agrowisata di Pandanrejo memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dengan menyediakan sumber pendapatan alternatif bagi para petani, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan nilai produk pertanian. Ini memungkinkan petani lokal untuk terlibat dalam kegiatan agrowisata, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka tetapi juga mempromosikan produk pertanian lokal, seperti stroberi, melalui penjualan langsung dan produk olahan. Inisiatif ini membantu meningkatkan kondisi ekonomi secara keseluruhan di komunitas dengan mengintegrasikan pariwisata dengan

pertanian, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi komunitas (Maharani & Sulismadi, 2023).

Jurnal oleh Ratnawati, M Taufiq Noor Rokhman, Yayuk Ngesti Rahayu, Ayu Agus Tya Ningsih ini menguraikan inisiatif layanan masyarakat di Desa Bumiaji, Kota Batu, Malang, Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengelola keuangan mereka melalui aplikasi Digital LAMIKRO. Dipimpin oleh Dr. Ratnawati dan Dr. Yayuk Ngesti Rahayu, program ini mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM, seperti metode pencatatan keuangan konvensional dan kurangnya pengetahuan tentang keuangan digital. Melalui pelatihan dan pembelajaran interaktif, peserta dilengkapi dengan keterampilan untuk memanfaatkan aplikasi LAMIKRO secara efektif, meningkatkan kemampuan manajemen keuangan mereka dan memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman. Inisiatif ini tidak hanya mendorong literasi keuangan di kalangan UMKM tetapi juga memberikan wawasan berharga bagi mahasiswa mengenai manfaat digitalisasi keuangan. UMKM menghadapi beberapa tantangan spesifik dalam manajemen keuangan, termasuk kurangnya pengetahuan, pencatatan keuangan yang tidak memadai, akses terbatas ke teknologi, literasi digital yang rendah, praktik konvensional. Program ini bertujuan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan memberikan pelatihan dan panduan tentang penggunaan aplikasi Digital LAMIKRO untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik (Ratnawati, Rokhman, Rahayu, & Ningsih, 2024).

Jurnal oleh Budi Setiawan, Febrinanda Faizal ini membahas strategi pemasaran berkelanjutan yang diterapkan oleh Lumbung Stroberi BUMDes Raharjo di Kota Batu, menekankan pentingnya komunikasi interaktif dengan konsumen untuk membangun hubungan jangka panjang. Ini mengidentifikasi kenyamanan sebagai faktor penting yang mempengaruhi minat beli konsumen, terutama terkait produk stroberi organik, dan menyoroti korelasi positif antara minat konsumen dan keputusan pembelian, terutama di kalangan demografis yang terdidik dan berpenghasilan lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan Pemodelan Persamaan

Struktural (SEM) untuk menganalisis dampak berbagai variabel pemasaran terhadap perilaku konsumen, yang pada akhirnya merekomendasikan perbaikan dalam kualitas komunikasi dan mengeksplorasi potensi BUMDes di daerah tersebut. Kenaikan teknologi digital berdampak signifikan pada sistem pemasaran badan usaha milik desa (BUMDes) di Kota Batu dengan menciptakan tantangan dan peluang. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, pemasaran telah beralih secara dominan ke online, yang mengharuskan pengelola BUMDes untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar ini. Transisi ini memungkinkan peningkatan daya saing, karena sistem pemasaran berkelanjutan berbasis teknologi yang kuat dapat meningkatkan kualitas produk dan keterlibatan konsumen. Selain itu, strategi komunikasi online yang efektif dapat membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian mereka (Pertanian, 2024).

Jurnal oleh Erwin Maolidan, Istis Baroh, M. Zul Mazwan ini menganalisis preferensi konsumen terhadap stroberi di daerah "Lung Stroberi" Pandanrejo, Kota Batu, dengan fokus pada atribut-atribut yang mempengaruhi keputusan pembelian. Menggunakan analisis deskriptif dan analisis konjoin, studi ini mengidentifikasi rasa sebagai atribut terpenting, diikuti oleh harga, ukuran, daya tahan, warna kulit, dan bentuk. Mayoritas responden adalah orang terdidik dan memiliki pendapatan menengah, dengan preferensi yang condong pada stroberi berwarna merah cerah, besar, manis, dengan harga di bawah Rp 60.000/kg. Temuan tersebut menunjukkan bahwa produsen harus memprioritaskan peningkatan kualitas rasa, sementara penelitian mendatang dapat mengeksplorasi atribut tambahan. Karakteristik demografis responden secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian mereka untuk stroberi. Studi ini menunjukkan bahwa mayoritas pembeli stroberi berusia antara 20 hingga 30 tahun, dengan kelompok usia ini terdiri dari 36 responden. Selain itu, karakteristik berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa karyawan swasta merupakan kelompok pembeli terbesar, dengan jumlah mencapai 35% dari responden. Selain itu, latar belakang pendidikan juga berperan, dengan sebagian besar pembeli memiliki

gelar sarjana. Faktor demografis ini dapat mempengaruhi preferensi terhadap atribut seperti rasa, harga, dan ukuran stroberi, yang pada akhirnya memandu pilihan pembelian mereka (MAOLIDAN, 2022).

Jurnal oleh Fatmasari Endayani, Dyah Setyawati, Lilik Kustiani, Dewi Rakhmawati, Roby Nur Akbar, Ernita Dian Puspasari, Aryntika Cahyantini, Resanti Lestari, Diah Widiawati ini membahas inisiatif pengabdian masyarakat yang berfokus pada pelatihan kewirausahaan bagi petani stroberi di Lumbung Stroberi, Desa Pandanrejo, Kota Batu, Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan manajemen pelanggan dan pemahaman tentang Business Model Canvas (BMC) agar para petani dapat mengelola bisnis mereka secara holistik dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan pendapatan sambil mengevaluasi efektivitas pelatihan dan mengatasi tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan. Keberlanjutan program ditekankan untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi komunitas. Pelatihan tersebut secara signifikan meningkatkan kemampuan petani untuk bersaing di pasar lokal dan internasional dengan mengintegrasikan alat digital, teknologi pertanian modern, dan keterampilan manajemen pelanggan. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya meningkatkan keahlian teknis mereka tetapi juga membekali mereka dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pasar dan kebutuhan pelanggan, yang mengarah pada peningkatan produktivitas, kualitas produk, dan akses pasar. Akibatnya, petani stroberi yang terlatih mampu mencapai pendapatan yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, sehingga memperkuat posisi kompetitif mereka di sektor pertanian (Endayani, Setyawati, Kustiani, & ..., 2023).

Jurnal oleh Dessy Kusuma Dewi, Ali Hanafiah membahas pengembangan Desa Wisata Pandanrejo di Kota Batu, Indonesia, yang menyoroti peran Dinas Pariwisata setempat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif pariwisata, khususnya pertanian stroberi. Penelitian kualitatif mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah dalam hal infrastruktur, pelatihan, dan sumber daya telah secara signifikan

meningkatkan kondisi ekonomi petani lokal, yang kini menjual langsung kepada wisatawan. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dampak pandemi COVID-19 tetap menjadi hambatan bagi pengembangan yang optimal, yang memerlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Pendirian Strawberry Lumbang telah secara signifikan meningkatkan pendapatan petani lokal di komunitas tersebut. Sebelumnya, petani menjual hasil panen stroberi mereka kepada tengkulak dengan harga rendah, yang sering kali tidak menutupi biaya produksi mereka. Dengan Lumbang, petani dapat menjual stroberi mereka langsung kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi, yang mengarah pada peningkatan keuntungan. Perubahan ini telah mendorong lebih banyak anggota komunitas untuk mengubah lahan kosong mereka menjadi kebun stroberi, yang semakin meningkatkan situasi ekonomi mereka (Dewi, Hanafiah, Akses, & Mal, 2021).

Jurnal oleh Ayu Dyah Amelia, Ety Dwi Susanti ini meneliti peran penting komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Lumbang Stroberi, menyoroti partisipasi aktif mereka dalam pelestarian lingkungan, pelestarian warisan budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui metode penelitian kualitatif, termasuk wawancara mendalam dan observasi partisipatif, studi ini mengungkapkan bahwa keterlibatan komunitas sangat penting untuk manajemen sumber daya yang efektif dan pengambilan keputusan dalam kebijakan pariwisata. Penduduk setempat tidak hanya menyediakan layanan pariwisata dan mengembangkan produk pertanian, tetapi juga terlibat dalam praktik budaya dan inisiatif lingkungan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengalaman pariwisata yang berkelanjutan dan otentik yang menguntungkan baik pengunjung maupun komunitas. Komunitas lokal berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dengan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan menerapkan praktik ramah lingkungan. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan lokal mereka, yang memungkinkan mereka memberikan wawasan berharga dan menerapkan praktik berkelanjutan yang membantu menjaga keseimbangan ekologi. Misalnya, dalam kasus Lumbang Stroberi, komunitas

terlibat dalam pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan inisiatif konservasi keanekaragaman hayati, seperti program penanaman pohon yang meningkatkan ekosistem lokal dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Upaya-upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesadaran akan konservasi keanekaragaman hayati di kalangan penduduk setempat dan pengunjung (Amelia & Ety Dwi Susanti, 2024).

Jurnal oleh Miranti Puspaningtyas, Etik Yulia, Fitroh Rismy Farazila membahas pemanfaatan produk pertanian lokal untuk meningkatkan peluang ekonomi di desa-desa tertentu di Indonesia. Artikel pertama menyoroti sebuah program di Desa Pandanrejo, Batu, di mana sebuah demonstrasi pembuatan pie susu stroberi dilakukan untuk memberdayakan perempuan setempat dan mempromosikan inovasi makanan berbasis stroberi. Artikel kedua berfokus pada potensi budidaya salak di Jatirejo, Jombang, menekankan manfaat ekonominya bagi masyarakat setempat. Kedua inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan lokal dan menciptakan peluang bisnis baru. Di Desa Pandanrejo, produk makanan inovatif yang diperkenalkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal adalah pie susu stroberi. Produk ini dikembangkan melalui demonstrasi yang dilakukan oleh tim MBKM Membangun Desa, yang bertujuan untuk memanfaatkan stroberi, yang merupakan produk unggulan desa, untuk menciptakan persiapan makanan baru. Inisiatif ini tidak hanya mempromosikan penggunaan stroberi lokal tetapi juga bertujuan untuk menciptakan peluang bisnis dan meningkatkan ekonomi lokal (Puspaningtyas, Yulia, & Farazila, 2022).

2.2.Kerangka Teori

2.2.1. Peran BUMDes

A. Definisi Peran BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh masyarakat, BUMDes berfungsi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya

serta potensi yang ada di desa (Jusman Iskandar et al., 2021). Salah satu peran utama BUMDes adalah menciptakan sumber pendapatan baru bagi desa melalui berbagai usaha, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan perdagangan. Dengan demikian, BUMDes berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan desa dan memperkuat perekonomian lokal.

Selain meningkatkan pendapatan, BUMDes juga berperan dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Dengan adanya usaha yang dikelola oleh BUMDes, peluang kerja bagi penduduk desa semakin terbuka, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Izzah & Kolopaking, 2020). Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan usaha desa.

Secara keseluruhan, peran BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa sangat vital. Dengan mengelola sumber daya secara efektif, BUMDes tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mewujudkan kemandirian ekonomi di tingkat desa. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan BUMDes dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

B. Peran BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi lokal. Sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh masyarakat desa, BUMDes berfungsi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang ada di desa. Beberapa peran utama BUMDes dalam pengembangan ekonomi lokal (Laili Nihayah, Moehadi, & Mustofa, 2021):

1. Penciptaan Lapangan Kerja

BUMDes berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Dengan mengembangkan berbagai usaha, seperti pertanian, kerajinan, perdagangan, dan jasa, BUMDes memberikan peluang bagi penduduk desa untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini tidak hanya mengurangi angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak positif pada perekonomian lokal.

2. Peningkatan Pendapatan Desa

Melalui pengelolaan usaha yang efektif, BUMDes dapat meningkatkan pendapatan desa. Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha BUMDes dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan desa, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, BUMDes berperan sebagai sumber pendapatan yang penting bagi desa, yang memungkinkan desa untuk mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

3. Pemberdayaan Masyarakat

BUMDes berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat desa. Melalui pelatihan dan penyuluhan, BUMDes dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola usaha. Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan ekonomi di desa. Dengan masyarakat yang lebih terampil dan berdaya, desa dapat mengembangkan potensi ekonominya secara lebih optimal.

4. Pengembangan Infrastruktur

BUMDes juga berperan dalam pengembangan infrastruktur desa. Usaha yang dijalankan oleh BUMDes sering kali berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan pasar, penyediaan air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, sehingga memudahkan mereka dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan

bertransaksi. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

5. Diversifikasi Ekonomi

BUMDes mendorong diversifikasi ekonomi di desa dengan mengembangkan berbagai jenis usaha. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan dan meningkatkan ketahanan ekonomi desa. Dengan adanya berbagai usaha, desa dapat lebih adaptif terhadap perubahan kondisi pasar dan lingkungan, serta lebih mampu menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin muncul.

C. Konsep Peran BUMDes

1. Fungsi BUMDes

- a. Pengelolaan Sumber Daya: BUMDes berperan dalam mengelola sumber daya alam dan potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, kerajinan tangan, dan pariwisata (Sigrid, 2024). Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan desa.
- b. Penyediaan Layanan Ekonomi: BUMDes menyediakan berbagai layanan ekonomi, seperti pasar desa, toko bahan pokok, dan layanan transportasi. Layanan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- c. Pemberdayaan Masyarakat: BUMDes berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola usaha, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.

2. Tujuan BUMDes

- a. Meningkatkan Pendapatan Desa: Dengan mengembangkan usaha yang produktif, BUMDes diharapkan dapat meningkatkan

pendapatan asli desa, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

- b. Menciptakan Lapangan Kerja: BUMDes berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Mendorong Kemandirian Ekonomi: Melalui pengelolaan usaha yang berkelanjutan, BUMDes bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa, sehingga desa tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

3. Dampak BUMDes

- a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Dengan meningkatnya pendapatan dan terciptanya lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat, yang tercermin dalam perbaikan kualitas hidup dan akses terhadap layanan dasar.
- b. Pengembangan Infrastruktur: BUMDes dapat berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur desa, seperti jalan, pasar, dan fasilitas umum lainnya, yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: BUMDes mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha, sehingga masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap perkembangan desa.

2.2.2. Ekonomi Lokal

A. Definisi Ekonomi Lokal

Menurut buku *Perekonomian Indonesia* dari Prof. Drs. M. Suparmoko, M.A.,PhD (2017), Ekonomi Lokal dapat diartikan sebagai “kemampuan ekonomi daerah lokal yang bisa dan patut untuk dikembangkan dan terus menerus berkembang serta menjadi sumber pencaharian masyarakat sekitar bahkan dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian daerah seutuhnya untuk lebih berkembang” ” (Prof. Drs. M. Suparmoko, M.A.PhD, Dr. Furtasan Ali Yusuf, SE.S.Kom, 2017).

Pengembangan Ekonomi lokal (PEL) menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan ketahanan dan kekuatan ekonomi rakyat dalam menghadapi pengaruh dan dampak negatif globalisasi. Pengembangan ekonomi lokal merupakan usaha mengembangkan ekonomi daerah berdasarkan atas potensi, kondisi sosial, ekonomi, budaya Masyarakat dengan memanfaatkan kolaborasi stakeholder, baik pemerintah, dunia usaha/ swasta, organisasi masyarakat, dan Masyarakat lokal.

World Bank (2006) mendefinisikan PEL sebagai suatu proses di mana masyarakat, lembaga usaha, dan organisasi non pemerintah bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan pekerjaan pada tingkat lokal, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua.

a. Aspek Dalam Ekonomi Lokal

- (1) Kelompok sasaran pengembangan ekonomi lokal;
- (2) Faktor lokasi;
- (3) Sinergi;
- (4) Pembangunan berkelanjutan yang melihat pada aspek ekonomi, ekologis, dan sosial;
- (5) Tata pemerintahan terdiri dari kemitraan dengan sektor publik dan swasta, perampingan regulasi di sektor publik dan pengembangan organisasi;
- (6) Manajemen, pengembangan ekonomi lokal didasarkan pada proses berulang dengan landasan diagnostik dan perencanaan, implementasi, dan monitoring serta evaluasi.

B. Pariwisata

a. Definisi Pariwisata

Secara etimologi istilah pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta “pari” yang berarti ‘seluruh, semua atau penuh’ dan “wisata” yang berarti ‘perjalanan’. Pariwisata dimaknai sebagai perjalanan yang penuh atau lengkap, yaitu bepergian dari suatu

tempat tertentu ke satu atau beberapa tempat lain, singgah atau tinggal beberapa saat tanpa bermaksud untuk menetap, dan kemudian kembali ke tempat asal (Susanti Rauf, Rasid Pora, Bakri La Suhu, 2024).

Di era peradaban modern definisi pariwisata ternyata telah berkembang lebih luas dan progresif. Di dalam praktik bermunculan jenis-jenis wisata yang sebelumnya tidak dikenal atau pengertiannya masih tumpang tindih seperti: wisata bisnis, wisata medis, wisata spiritual/religi, wisata alam, ekowisata, wisata alam liar, wisata petualangan, wisata alternatif, wisata halal, dan sebagainya.

Di dalam konteks kepariwisataan, pengembangan pariwisata diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan unsur-unsur dan/atau elemen-elemen pariwisata menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya dalam rangka memaksimalkan manfaat. Alasan mengembangkan pariwisata didasarkan pada kenyataan bahwa sektor pariwisata adalah industri jasa terbesar di dunia saat ini (Susanti Rauf, Rasid Pora, Bakri La Suhu, 2024).

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata dalam pasal 1 ayat 3, pariwisata adalah segala jenis aktivitas wisata dan didukung dengan segala fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, maupun pemerintah daerah.

b. Jenis Jenis Pariwisata

Kategori pariwisata tersebut antara lain (Spillane, 1987) :

- a. *Pleasure Tourism*, adalah pariwisata untuk menikmati perjalanan. Bentuk dari wisata ini adalah sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan wisata untuk mencari suasana baru untuk berlibur sesuai dengan keinginan untuk menikmati keindahan alam, menenangkan diri dari pekerjaan

sehari-hari, mengetahui sejarah ataupun berbelanja menghabiskan waktu di tempat keramaian.

- b. Recreation Tourism, adalah pariwisata untuk rekreasi. Jenis pariwisata ini yaitu perjalanan wisata yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memanfaatkan hari libur untuk mengunjungi objek wisata tertentu sesuai dengan keinginan seperti rekreasi ke Pantai, memancing ikan di sungai, dan mengunjungi tempat yang memiliki pemandangan alam seperti gunung.
- c. Cultural Tourism, adalah pariwisata untuk kebudayaan. Jenis pariwisata ini adalah berwisata dengan mengenal kebudayaan 16 pada setiap daerah maupun di suatu negara lain seperti mengunjungi sebuah monumen bersejarah, pusat kesenian dan keagamaan, mempelajari adat istiadat.
- d. Sports Tourism, adalah pariwisata untuk olah raga. Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang tujuannya untuk mengikuti kegiatan olahraga atau event olahraga.
- e. Business Tourism, adalah pariwisata untuk urusan usaha dagang besar. Pariwisata jenis ini merupakan pariwisata yang digunakan para pelaku usaha atau pemilik usaha perjalanan yang menggunakan waktu luangnya untuk menikmati dirinya sebagai wisatawan yang berkunjung di beberapa objek wisata.
- f. Convention Tourism, adalah pariwisata untuk konvensi. Jenis pariwisata ini adalah suatu konvensi yang mengadakan acara pertemuan yang dihadiri oleh banyak negara, dan biasanya 17 menginap dalam waktu beberapa hari di tempat atau negara yang menyelenggarakan acara pertemuan tersebut.

C. Industri pariwisata

Industri pariwisata merupakan suatu entitas ekonomi yang mencakup beragam sektor usaha yang secara langsung maupun tidak langsung menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan

para wisatawan selama melakukan perjalanan. Dalam konteks ini, aktivitas industri pariwisata meliputi layanan akomodasi, transportasi, kuliner, jasa pemandu wisata, serta berbagai bentuk hiburan dan atraksi budaya. Keseluruhan unsur tersebut saling terhubung dalam satu ekosistem ekonomi yang kompleks dan berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor jasa secara umum. Karena karakteristiknya yang melibatkan banyak lini usaha, industri pariwisata sering dipandang sebagai sektor multi produktif yang mampu menciptakan nilai tambah dalam berbagai bentuk, baik secara finansial maupun sosial. Oleh sebab itu, pariwisata tidak lagi dipahami sekadar sebagai aktivitas rekreasi, melainkan sebagai komponen industri yang memberikan dampak ekonomi secara nyata.

Sifat produktif dari industri pariwisata menjadikan sektor ini sebagai salah satu motor penggerak pembangunan daerah, khususnya di wilayah yang memiliki potensi alam dan budaya yang khas. Aktivitas dalam industri ini tidak hanya menghasilkan output ekonomi berupa pendapatan dan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat identitas lokal melalui promosi budaya dan pelestarian warisan daerah. Dengan demikian, sektor pariwisata memiliki dimensi ekonomi yang luas dan bersifat lintas sektor, yang dalam praktiknya turut mendorong pertumbuhan industri kreatif, UMKM, serta pembangunan infrastruktur penunjang. Oleh karena itu, dalam kerangka pembangunan ekonomi berkelanjutan, industri pariwisata perlu diposisikan sebagai sektor strategis yang memerlukan perencanaan matang, investasi yang terarah, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

D. Implementasi Kebijakan

a. Definisi Kebijakan

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip, pedoman, atau keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses pembentukannya, kebijakan tidak muncul begitu saja, melainkan

melalui analisis yang mendalam terhadap situasi yang ada, kebutuhan yang harus dipenuhi, dan tujuan yang ingin dicapai (Setiawan, 2024). Hal ini mencakup identifikasi masalah yang relevan dan pemahaman tentang konteks sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi keputusan tersebut. Dengan demikian, kebijakan menjadi instrumen strategis yang dirancang untuk memberikan arahan dan solusi terhadap isu-isu yang dihadapi.

Selain itu, kebijakan juga mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi implementasinya, seperti sumber daya yang tersedia, keterlibatan pemangku kepentingan, dan potensi dampak jangka panjang. Kebijakan yang baik harus mampu menjawab tantangan yang ada dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat atau organisasi. Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan harus melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan yang beragam serta menciptakan legitimasi dalam pelaksanaannya.

Unsur-Unsur Kebijakan :

1. Tujuan
Kebijakan selalu memiliki tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Prinsip dan Pedoman
Kebijakan mencakup prinsip-prinsip dan pedoman yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan.
3. Subjek dan Objek
Kebijakan dapat ditujukan kepada individu, kelompok, atau masyarakat luas, dan dapat berfokus pada berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
4. Proses Pengambilan Keputusan
Kebijakan dihasilkan melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan analisis, pertimbangan, dan evaluasi berbagai alternatif.
5. Implementasi

Kebijakan harus diimplementasikan melalui tindakan nyata, yang melibatkan berbagai pihak dan sumber daya.



b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan (Mauliddiyah, 2021). Berikut adalah beberapa faktor utama yang berperan dalam implementasi kebijakan:

1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang mencakup masyarakat, aparat pemerintah, serta pihak swasta memegang peranan yang sangat vital. Peran aktif mereka tidak hanya memperkuat fondasi legitimasi dari kebijakan yang dirancang, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam kelancaran pelaksanaan program di lapangan. Keterlibatan masyarakat, sebagai kelompok sasaran utama, memungkinkan kebijakan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan nyata yang ada di lingkungan lokal (Susanti, et. al 2025). Di sisi lain, sektor pemerintah, sebagai pelaksana dan pengatur, harus membangun sinergi yang kuat dengan aktor lainnya agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Dukungan dari sektor swasta, baik dalam bentuk sumber daya, jaringan, maupun inovasi teknologi, juga dapat mempercepat pencapaian tujuan kebijakan dengan memberikan nilai tambah pada proses implementasi.

Sebaliknya, jika terdapat resistensi atau keikutsertaan dari para pemangku kepentingan, maka hambatan dalam pelaksanaan kebijakan menjadi tidak terelakkan. Penolakan, baik yang bersifat terbuka maupun pasif dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan proses implementasi, terlebih apabila kebijakan tersebut menyentuh kepentingan-kepentingan yang dianggap sensitif oleh masyarakat. Ketidakhadiran komunikasi yang inklusif serta lemahnya mekanisme konsultasi publik seringkali menjadi pemicu munculnya ketidakpercayaan terhadap kebijakan yang dijalankan. Dengan membangun relasi kolaboratif antar aktor, kebijakan publik memiliki

peluang lebih besar untuk diterima, dijalankan secara konsisten, dan menghasilkan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

2. Sumber Daya

Keberadaan sumber daya yang memadai baik dalam bentuk keuangan, sumber daya manusia, maupun material merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan. Sumber daya finansial, misalnya, menjadi penopang utama dalam membiayai berbagai kegiatan, mulai dari tahap sosialisasi hingga evaluasi kebijakan (Ismoko, et al., 2023). Sementara itu, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten turut menentukan seberapa efektif program dapat dijalankan di lapangan. Keberadaan sarana dan prasarana yang sesuai, akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika salah satu dari ketiga elemen tersebut mengalami kekurangan atau ketidaksesuaian, maka pelaksanaan kebijakan berisiko mengalami keterlambatan, bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai konsekuensinya, kebijakan yang menuntut pembiayaan tinggi, kebutuhan logistik besar, atau sumber daya manusia dalam jumlah banyak, perlu dirancang dengan strategi perencanaan yang cermat dan realistis. Alokasi sumber daya harus dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan yang paling mendesak, dengan mempertimbangkan efisiensi serta potensi keberlanjutan jangka panjang. Perencanaan tersebut juga perlu disertai dengan kajian awal terhadap kapasitas lembaga pelaksana, sehingga distribusi beban kerja maupun anggaran dapat lebih seimbang dan terukur. Dalam hal ini, integrasi antara aspek perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan harus menjadi perhatian utama, agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai dan dialokasikan secara strategis, kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun, hanya akan berakhir sebagai dokumen normatif tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

3. Kualitas Perencanaan dan Desain Kebijakan

Perencanaan yang sistematis dan desain kebijakan yang terstruktur merupakan fondasi utama bagi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik. Apabila suatu kebijakan dirumuskan secara jelas, dengan indikator yang terukur serta tujuan yang realistis, maka proses pelaksanaannya di tingkat teknis akan menjadi lebih mudah untuk dikendalikan dan dievaluasi. Dalam konteks ini, kejelasan formulasi kebijakan menjadi penting agar tidak menimbulkan interpretasi ganda yang dapat memicu kebingungan di tingkat pelaksana. Kebijakan yang didukung oleh kajian empirik, baik dalam bentuk analisis kebutuhan, proyeksi dampak, maupun pemetaan risiko, cenderung memiliki daya implementasi yang lebih tinggi karena telah disesuaikan dengan konteks sosial dan institusional yang ada. Desain kebijakan yang matang berfungsi sebagai panduan strategis dalam merespons permasalahan publik secara efektif dan efisien.

Sebaliknya, apabila perumusan kebijakan dilakukan secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan kondisi objektif di lapangan atau masukan dari para pemangku kepentingan, maka risiko terhambatnya implementasi akan semakin besar (Wijiharta, et al., 2021). Kebijakan yang bersifat terlalu umum atau tidak disesuaikan dengan kapasitas institusi pelaksana sering kali menimbulkan kendala teknis di lapangan, baik dari segi koordinasi maupun alokasi sumber daya. Ketiadaan kerangka kerja yang adaptif terhadap dinamika lokal dapat mengakibatkan kebijakan tidak dapat dijalankan secara konsisten atau bahkan ditolak oleh masyarakat sasaran. Oleh karena itu, perencanaan kebijakan harus tidak hanya fokus pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan keterkaitan antara tujuan, strategi, dan realitas pelaksanaan. Dalam hal ini, kemampuan untuk mengintegrasikan hasil analisis kebijakan ke dalam perumusan yang operasional menjadi kunci utama untuk menjamin kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

4. Struktur Organisasi dan Koordinasi

Struktur organisasi yang tertata dengan baik, disertai sistem koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan, merupakan prasyarat penting dalam menjamin efektivitas implementasi kebijakan publik. Ketika peran dan tanggung jawab setiap aktor, baik dari lembaga pemerintah, mitra swasta, maupun organisasi masyarakat sipil, didefinisikan secara jelas, maka potensi terjadinya tumpang tindih tugas dapat diminimalisir. Sebaliknya, ketiadaan koordinasi yang fungsional kerap kali melahirkan disorientasi operasional, konflik kewenangan, bahkan kegagalan pelaksanaan di lapangan (Wijiharta et al., 2021). Koordinasi lintas sektor diperlukan tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga selama proses pelaksanaan dan evaluasi, guna memastikan kebijakan tetap berada pada jalur yang sesuai. Dalam hal ini, komunikasi yang terbuka, mekanisme pelaporan yang terstandarisasi, serta forum koordinasi yang aktif menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Di samping itu, kapasitas kelembagaan dan tingkat komitmen dari organisasi pelaksana turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten, sistem kerja yang efisien, serta budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan, cenderung lebih siap dalam mengantisipasi hambatan dan menyesuaikan strategi implementasi sesuai dengan kondisi yang berkembang. Komitmen pimpinan lembaga terhadap pencapaian tujuan kebijakan juga memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan di tengah dinamika birokrasi. Kelembagaan yang kuat akan lebih mudah dalam membangun sinergi dengan aktor lain serta mampu mengelola konflik yang mungkin muncul selama proses implementasi. Oleh karena itu, desain kelembagaan yang mendukung serta mekanisme koordinasi yang melekat di setiap jenjang organisasi perlu menjadi perhatian utama dalam perumusan strategi implementasi kebijakan secara menyeluruh.

5. Lingkungan Sosial dan Budaya

Konteks sosial dan budaya lokal merupakan variabel penting yang tidak dapat diabaikan dalam setiap proses implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang dirancang tanpa memperhatikan nilai-nilai, norma, serta praktik sosial yang telah mengakar dalam masyarakat berpotensi menimbulkan resistensi di tingkat akar rumput. Lingkungan sosial, dalam hal ini, bukan hanya sebagai latar pelaksanaan kebijakan, melainkan sebagai elemen aktif yang membentuk respons masyarakat terhadap intervensi kebijakan tersebut. Tradisi lokal, pola hubungan sosial, serta struktur kewenangan informal seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi (Lathifah & Frinaldi, 2024). Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konfigurasi sosial-budaya setempat menjadi langkah awal yang krusial dalam merancang strategi pelaksanaan kebijakan yang inklusif dan responsif.

Di sisi lain, kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai budaya masyarakat akan memperbesar peluang diterimanya kebijakan secara sukarela oleh masyarakat. Ketika kebijakan mampu merefleksikan identitas kolektif, serta menghormati kearifan lokal, maka dukungan masyarakat cenderung meningkat, dan partisipasi aktif dapat terbangun secara alami. Sebaliknya, kebijakan yang bertentangan atau dianggap asing terhadap tatanan budaya yang ada, seringkali menghadapi penolakan, baik secara terbuka maupun terselubung. Dalam situasi demikian, kebijakan menjadi sulit diimplementasikan secara optimal meskipun telah didukung oleh sumber daya dan perangkat regulatif yang memadai. Oleh sebab itu, integrasi antara analisis kebijakan dengan pendekatan sosial-budaya harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan, agar proses implementasi tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sah secara sosial.

6. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi, sebagai bagian integral dari siklus kebijakan publik, memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui proses monitoring yang terstruktur, aktor-aktor pelaksana dapat mengamati perkembangan pelaksanaan kebijakan secara real time dan mengidentifikasi potensi deviasi sejak dini (Sama, 2025). Pemantauan yang dilakukan secara berkala juga memungkinkan munculnya data empiris yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan taktis, baik di tingkat lokal maupun pusat. Evaluasi, yang dilakukan secara sistematis dan berbasis indikator kinerja, memberikan informasi objektif mengenai sejauh mana kebijakan tersebut efektif, efisien, dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi bukan hanya instrumen pengawasan, tetapi juga menjadi alat refleksi dan pembelajaran kebijakan secara berkelanjutan.

Keberadaan sistem monitoring yang efektif dan adaptif memberikan ruang bagi para pemangku kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi selama proses implementasi berlangsung. Ketika hambatan teridentifikasi lebih awal, intervensi kebijakan dapat dikalibrasi ulang tanpa harus menunggu siklus kebijakan berikutnya, sehingga efisiensi pelaksanaan dapat tetap terjaga. Dalam hal ini, keterlibatan multipihak dalam proses evaluasi termasuk masyarakat, lembaga pengawas, dan akademisi mampu memperkaya perspektif serta menjamin akuntabilitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, sistem monitoring yang transparan mendorong terbangunnya kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan, serta menciptakan mekanisme koreksi diri bagi lembaga pelaksana. Oleh karena itu, desain kebijakan yang baik harus mengintegrasikan komponen monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari kerangka kerja utama, bukan sekadar sebagai pelengkap administratif.

2.2.3. Panduan Tata Kelola BUMDes

A. Pemdus dan Masyarakat Bersepakat Mendirikan BUMDes

Pendirian BUMDes yang diawali dengan rembug desa menunjukkan bahwa legitimasi sosial sangat dipentingkan dalam pembangunan kelembagaan ekonomi di desa. Forum rembug bukan hanya mekanisme formal, melainkan arena pengambilan keputusan yang mencerminkan nilai musyawarah sebagai bagian dari budaya sosial Indonesia. Melalui forum ini, seluruh unsur masyarakat diberi ruang menyuarakan ide dan kepentingannya sehingga keputusan mendirikan BUMDes menjadi hasil kolektif bukan inisiasi elitis dari perangkat desa semata.

Identifikasi potensi lokal dan permintaan pasar yang dilakukan dalam tahap ini menggambarkan pergeseran paradigma dari top-down menuju pendekatan partisipatif. Proses tersebut menuntut keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek penggerak utama. Kegiatan ini menyatukan pemikiran dengan analisis ekonomi yang lebih sistematis, sehingga menghasilkan rancangan usaha yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat.

Penyusunan AD/ART dan legalisasi hukum menegaskan bahwa walaupun BUMDes berpijak pada norma dan nilai tradisional, namun tetap diarahkan untuk memiliki daya tahan hukum formal. Kombinasi antara kesepakatan adat dan prosedur resmi menjadi kekuatan sosial dan hukum BUMDes. Dalam hal ini BUMDes menjadi entitas yang lahir dari kearifan komunitas, tetapi juga memiliki legitimasi administratif yang kuat, sehingga dapat diandalkan sebagai alat pembangunan berbasis komunitas.

B. Pengelolaan BUMDes dan Persyaratan Pemegang Jabatan

Tahapan pengelolaan menggarisbawahi perlunya profesionalisme dalam sistem kerja yang tetap adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat desa. Penetapan syarat pendidikan minimal bagi pengelola BUMDes tidak sekadar mempertimbangkan kapasitas teknis, tetapi juga berperan sebagai upaya menaikkan standar kerja kelembagaan ekonomi desa. Namun kebijakan tersebut tetap memberi ruang bagi warga lokal

untuk berpartisipasi, asalkan mampu menunjukkan kompetensi yang sesuai, sehingga tidak menimbulkan eksklusi sosial.

Pembagian kerja secara vertikal antara manajer, bendahara, sekretaris, dan karyawan mencerminkan struktur organisasi modern yang diselaraskan dengan budaya yang ada di desa. Penguatan akuntabilitas dan tanggung jawab personal di tiap lini pengelolaan menunjukkan bahwa sistem BUMDes diarahkan tidak hanya pada keberhasilan finansial, tetapi juga kestabilan sosial antar pelaku. Hal ini menjadikan BUMDes sebagai sarana pelatihan sosial bagi warga desa untuk memahami tata kelola BUMDes yang didasari prinsipnya.

Kebijakan pelibatan warga dalam proses rekrutmen dan penyusunan job description menunjukkan adanya komitmen pada nilai transparansi dan inklusivitas. Masyarakat diberi hak untuk mengetahui, memilih, bahkan mengkritisi calon pengelola sehingga BUMDes tidak menjadi alat segelintir elit desa. Dalam tatanan sosial budaya desa, praktik semacam ini memperkuat mekanisme sosial kontrol dan membangun kepercayaan bersama yang menjadi fondasi utama keberlangsungan usaha yang dilaksanakan BUMDes.

C. Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat teknokratis untuk menilai capaian kinerja, tetapi juga sebagai proses sosial untuk membangun kepercayaan publik terhadap BUMDes. Pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terbuka oleh Dewan Komisaris maupun unsur pemerintah daerah memperkuat persepsi masyarakat terhadap BUMDes sebagai kelompok yang kredibel dan responsif. Mekanisme ini juga menciptakan ruang partisipasi aktif warga dalam mengevaluasi jalannya usaha, yang penting untuk menjaga kesinambungan legitimasi sosial.

Evaluasi berkelanjutan yang dilakukan secara triwulan ataupun insidental membuat masyarakat desa dapat terlibat dalam proses refleksi kolektif. Proses ini tidak hanya menyoroti keberhasilan atau kegagalan tetapi juga mempertanyakan apakah arah kegiatan BUMDes tetap setia

pada aspirasi dan kepentingan lokal. Monitoring yang dilakukan secara terbuka memperkuat akuntabilitas sosial dan berpotensi menjadi praktik pembelajaran bersama antar warga.

Dengan pengawasan yang bersifat kolaboratif dan berlapis, BUMDes menjadi ruang belajar sosial bagi masyarakat desa untuk mengenali struktur tanggung jawab, mekanisme pelaporan, serta prinsip pertanggungjawaban publik. Tahapan ini secara tidak langsung memperkuat etika gotong royong dan integritas kolektif yang selama ini menjadi ciri khas tatanan sosial desa. Yang juga menjadi tempat penguatan kapasitas warga dalam memahami pentingnya disiplin tata kelola.

D. Pertanggungjawaban Pengelola

Tahapan pertanggungjawaban pengelola menjadi wujud paling konkret dari akuntabilitas publik di tingkat desa. Laporan tahunan yang wajib disampaikan dalam forum musyawarah desa bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga tindakan yang memposisikan warga sebagai pemegang kedaulatan atas jalannya BUMDes. Dalam forum tersebut, pengelola tidak hanya menyampaikan angka, tetapi juga mempertanggungjawabkan arah kebijakan dan dampak sosial dari usaha yang dikelola.

Penyampaian laporan yang mencakup aspek keuangan, kinerja, dan rencana pengembangan menandai bahwa BUMDes tidak semata lembaga ekonomi, melainkan juga lembaga sosial yang tunduk pada norma sosial. Ketika semua unsur masyarakat hadir dan terlibat aktif dalam menilai kerja pengelola, maka terbentuklah ekosistem sosial yang suportif sekaligus kritis. Proses ini menjadi jembatan antara struktur formal dan dinamika sosial informal yang hidup di tengah masyarakat desa.

Dengan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara terbuka, nilai transparansi dan keadilan diperkuat dalam sistem kerja BUMDes. Sehingga berperan besar dalam mencegah praktik penyimpangan, sekaligus menjadi ruang peneguhan kembali identitas sosial desa

sebagai komunitas yang menjunjung prinsip kejujuran dan musyawarah. Dalam hal ini, BUMDes lebih dari sekadar alat ekonomi, namun menjadikan simbol kohesi sosial dan aktualisasi nilai gotong royong dalam bentuk kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

